

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)**

**Disusun Oleh**

**Hendra Agus P**

**NIM. 0910230078**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana  
Ekonomi**



**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2016**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.2.Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.3. Belanja Daerah .....	17
2.4. Pengelolaan Keuangan Pemda .....	20
2.4.1. Perencanaan dan Anggaran.....	20
2.4.2. Pelaksanaan Anggaran Daerah .....	24
2.4.3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah .....	25
2.5.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	26
2.5.1. Neraca.....	26
2.5.2. Laporan Realisasi Anggaran .....	27
2.5.3. Laporan Arus Kas .....	29
2.5.4. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	30
2.6.Analisis Kinerja Keuangan Berdasar Laporan Keuangan .....	32
2.6.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	33

2.6.2. Rasio Efektivitas PAD.....	35
2.6.3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	36
2.6.4. Rasio Keserasian .....	37
2.6.5. Rasio Pertumbuhan .....	38
2.6.6. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman.....	39
2.7.Kerangka Pemikiran .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN .....43**

3.1.Lokasi Penelitian.....	43
3.2.Jenis Penelitian .....	43
3.3.Jenis Data dan Sumber Data .....	44
3.4.Metode Pengumpulan Data.....	44
3.5.Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	45
3.5.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	45
3.5.2. Rasio Efektivitas PAD.....	45
3.5.3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	46
3.5.4. Rasio Keserasian .....	46
3.5.5. Rasio Pertumbuhan .....	47
3.5.6. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman.....	47
3.6.Metode Analisis Data .....	48

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....35**

4.1.Gambaran Umum.....	49
4.1.1. Visi Misi Kabupaten Blitar .....	51
4.2.Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	52
4.2.1. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah.....	52
4.2.2. Analisis Efektivitas PAD .....	56
4.2.3. Analisis Efisiensi Keuangan Daerah .....	60
4.2.4. Analisis Keserasian.....	64
4.2.5. Analisis Rasio Pertumbuhan .....	67
4.2.6. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman .....	70

4.3.Hasil Analisis Perhitungan Rasio Keuangan.....	73
--	----

## **BAB V PENUTUP .....75**

5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	76
5.3.Saran .....	76

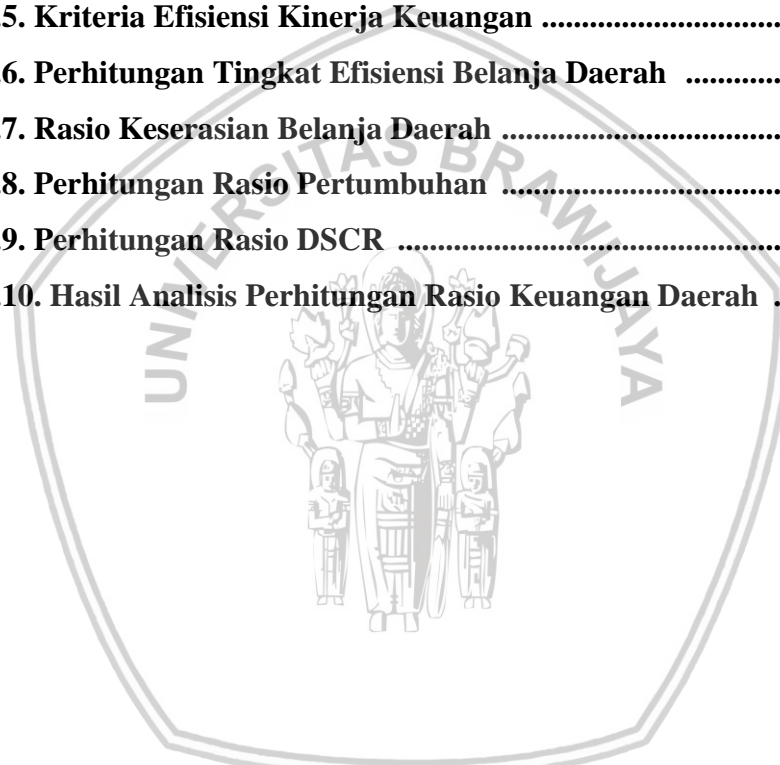
## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 2.2. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuanagan .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 2.3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 4.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4.2. Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4.3. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 4.4. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.5. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.6. Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 4.7. Rasio Keserasian Belanja Daerah .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 4.8. Perhitungan Rasio Pertumbuhan .....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 4.9. Perhitungan Rasio DSCR .....</b>	<b>71</b>
<b>Tabel 4.10. Hasil Analisis Perhitungan Rasio Keuangan Daerah .....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab Blitar ..</b>	<b>6</b>
Gambar 2.1. Perkembangan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab Blitar .....	17
Gambar 2.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Kab Blitar .....	20
Gambar 2.3 Gambar Kerangka Penelitian .....	41
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Blitar .....	49



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang pada saat ini berada dalam era persaingan global. Tolok ukur dari keberhasilan suatu negara dapat dilihat dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahannya. Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah. Tantangan besar dengan adanya kebijakan otonomi daerah karena salah satu kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadi lebih dekat dengan rakyatnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi rakyatnya daripada pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi dan kewenangan bagi daerah untuk mampu mengembangkan potensi yang dimiliki daerah. Pendapatan daerah memiliki pemahaman bahwa otonomi daerah adalah dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut Halim (2012:1) adalah sebagai berikut: Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disisi lain, fenomena paling

mencolok dari adanya penerapan otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah (PEMDA) yang tinggi pada pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut terlihat jelas bahwa dari sisi aspek keuangan pemerintah daerah kehilangan keleluasaannya untuk mengambil keputusan-keputusan penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan pemahaman pembangunan daerah terutama berkaitan dengan pembangunan fisik dapat dikatakan berkembang pesat. Namun, tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat pembangunan semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan dominan transfer yang berasal dari pusat.

Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menyebabkan kebutuhan mendesak akan standar akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) . Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit. Bentuk 18 pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Kusuma, 2013:17).



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : “ Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas ”.

Namun untuk mengubah sistem akuntansi kedalam basis akrual pastinya sangat memerlukan waktu yang banyak, sehingga untuk menjembatani perubahan tersebut, pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan PP 71 Tahun 2010 Lampiran II sebagai peraturan untuk transisi dari basis kas menjadi basis akrual. Perbedaan yang sangat mendasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis *Cash Toward Accrual* yaitu waktu pencatatan transaksi pengakuan pendapatan dan belanja, selain itu dari segi format laporan juga berubah. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis dan komponen laporan keuangan. Selain perbedaan komponen laporan keuangan di atas, permasalahan yang perlu diantisipasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah penerapan konsep pengakuan, pengukuran, dan pelaporan/pengungkapan.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta menyajikan laporan keuangan yang akurat, terakuntabilitas, dan transparan, maka Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Akrual yaitu PP No. 17 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat (SAP) berbasis akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau

dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan selanjutnya standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Sehingga dengan kata lain dalam basis akrual, pemerintahan melaporkan laporan finansial yang dituangkan kedalam Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam penulisan kali ini peneliti akan menganalisis tentang laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dimana mengacu pada Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian perangkat peraturan pendukung pelaksana otonomi diantaranya yang terkait dengan Pengolaan Keuangan Daerah PP No. 105 tahun 2000, PP No. 108 tahun 2000, dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang merupakan reformasi Akuntansi Sektor Publik Fiskal laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dalam hal keputusan sosial.

Pengelolaan keuangan daerah penting dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah secara nyata dapat dilihat dan ditunjukkan dengan pelaporan keuangan yang ditunjukkan setiap tahun dalam bentuk laporan keuangan. Mengingat pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk wujud fisik pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang

nantinya akan memuat hasil analisis laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah di periode selanjutnya.

Pengelolaan keuangan dalam hal ini berkaitan dengan laporan keuangan pendapatan belanja daerah Kabupaten Blitar diperlukan ketelitian termasuk dalam hal pemanfaatan anggaran disetiap tahunnya agar dapat terealisasi dengan baik, sehingga anggaran dan realisasi yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemakai yang berkepentingan agar kinerja dari pemerintah tersebut mudah dimengerti dan diketahui sesuai dari tujuan para pemakainya sebagai prinsip akuntabilitas.

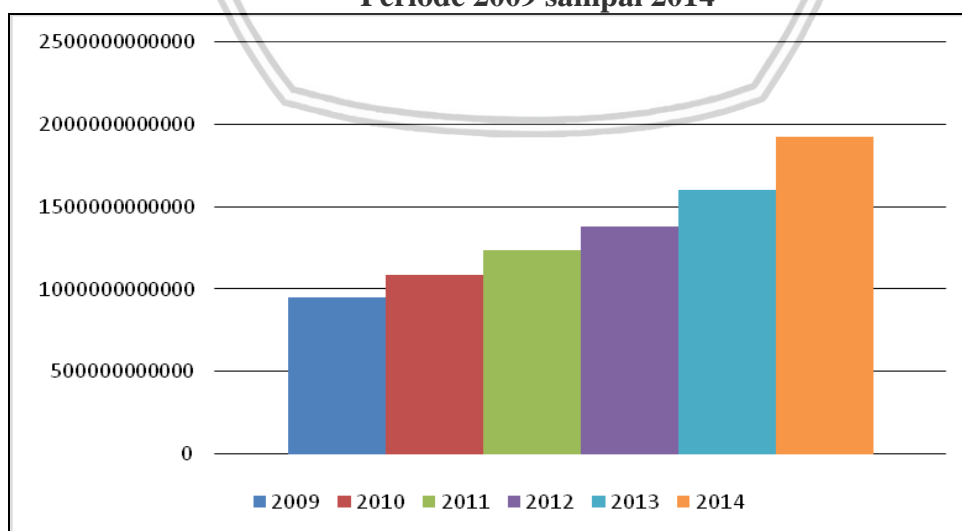
Selain itu, penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan juga sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Sonia (2013) pada pemda Magetan dan Wahidah dan Ventje (2016) pada pemda Minahasa Utara melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasilnya menemukan bukti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pada era otonomi daerah hasilnya berbeda beda pada setiap pemerintah daerah.

Menurut hasil penelitian Sonia (2013) kesimpulan yang dapat di tarik adalah pada pemda Magetan kinerja keuangan masih kurang baik, sedangkan hasil penelitian Wahidah dan Ventje (2016) mengungkapkan hasil analisis rasio keuangan pada pemda Minahasa Utara sudah baik dalam mengelola keuangannya. Penelitian-penelitian di atas ternyata menunjukkan hasil yang berbeda-beda antara kinerja keuangan pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainya.

Kajian penulisan kali ini, peneliti mencoba melakukan analisis serupa untuk memperoleh bukti empiris bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah, sebagaimana di jelaskan pada penulisan sebelumnya yang dilakukan di berbagai daerah dengan waktu yang berbeda memiliki informasi yang menarik dan karakteristik yang variatif, sehingga penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti Kabupaten Blitar dalam kurun waktu yang dibatasi yaitu 2012 hingga 2014. Dengan berbagai latar belakang pengambilan kurun waktu dan objek tersebut penelitian kali ini diharapkan informatif sehingga dapat menjadi masukan bagi daerah lain.

Informasi yang menarik diperoleh kembali ketika peneliti mengkaji perkembangan anggaran pendapatan Kabupaten Blitar dari tahun 2009 hingga 2014, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dimana instrumen dari pendapatan Kabupaten Blitar berasal dari PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah, yang ditampilkan pada gambar 1.1 dibawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar**  
**Periode 2009 sampai 2014**



*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar*

Berdasarkan gambar 1.1 diperoleh informasi bahwa realisasi anggaran pendapatan pada Kabupaten Blitar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2009 samapai tahun 2014. Digambarkan tahun 2009 sebesar Rp 949.744.658.023 untuk tahun 2010 sebesar Rp 1.089.237.368.748 tahun 2011 sebesar Rp 1.237.993.606.387 selanjutnya tahun 2012 sebesar Rp 1.380.532.579.040 tahun 2013 sebesar Rp 1.604.229.567.580 dan tahun 2014 sebesarRp 1.927.712.093.449. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah Kabupaten Blitar dengan realisasi pendapatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat sudah mempunyai tata kelola yang baik.

Penelitian kali ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada sampel penelitian dan periode penelitian. Diharapkan dapat menambah dan memperluas informasi mengenai analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjang penelitian sebelumnya sebagai penegas bahwa masing-masing daerah dalam waktu yang berbeda memilki hasil yang berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengukur dan evaluasi kinerja keuangan daerah Kabupaten lain umumnya dan khususnya tata kelola keuangan pemerintah kabupaten Blitar. Lebih mendalam lagi peneliti mengharapkan dengan judul tersebut menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

Analisis yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan Rasio keuangan yang relevan menurut Halim (2012:L-3) yaitu: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (2) Rasio Efektivitas PAD (3) Rasio Efisiensi (4) Rasio Aktivitas (5) Rasio Pertumbuhan (6) Debt Service Coverage Ratio DCSR. Rasio-

rasio tersebut dipilih karena rasio keuangan tersebut yang relevan dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, data untuk menghitung Rasio tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui angka-angka yang bersumber dari informasi di laporan keuangan.

Dalam penjelasan diatas peneliti membatasi tahun 2012 hingga 2014 sebagai tahun yang di ambil karena pada tahun tersebut relevan dalam penulisan. Selain alasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa walaupun dilihat dari realisasi pendapatan yang meningkat, hasil dari masing-masing rasio akan fluktuatif di setiap tahunnya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Keuangan (*Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar*)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah seperti berikut: Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2012-2014?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah.

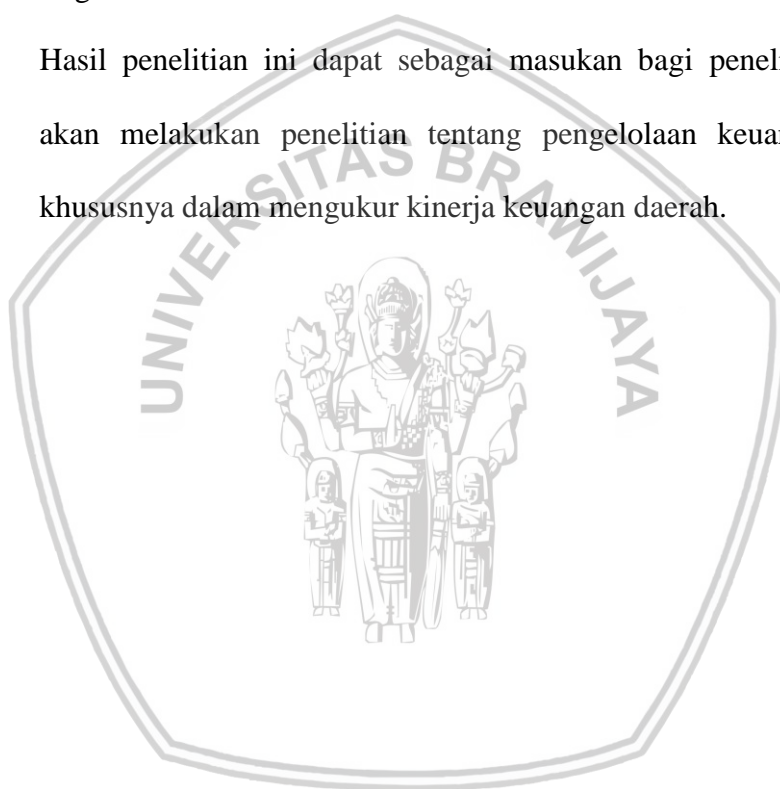
## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengukur dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

### b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam mengukur kinerja keuangan daerah.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Akuntansi Sektor Publik

##### 2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Berikut disebutkan beberapa definisi tentang akuntansi, menurut *Accounting Principles Board*, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dimana fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Sedangkan menurut *American Accounting Association*, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat meliputi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut Halim (2012:43).

Menurut Abdullah(1996) seperti yang dikutip oleh Abdul Halim(2007:251) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola oleh pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Bastian (2001:1) menyatakan bahwa sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum dan ekonomi sering mengakibatkan tumpang tindih batasan.



Halim (2007:252) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai suatu kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan dan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Pemerintah yang dimaksudkan dapat mencakup pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Menurut Bastian (2001:5) akuntansi sektor publik adalah akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Dari definisi tersebut dapat diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah informasi keuangan untuk mengelola urusan-urusan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak politik yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan yang memiliki alternatif penggunaan.

## **2.2. Pendapatan Asli Daerah**

UU No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah berasal dari 4 (empat) komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagi laba BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### 1. Pajak Daerah

Merupakan iuran pembayaran wajib yang dilakukan oleh perorangan pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pembangunan daerah.

Mahmudi (2010) membagi prinsip pajak menjadi 5, yaitu :

##### a. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya besarnya pajak daerah yang dibebankan mudah untuk naik dan turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elastisitas pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak.

##### b. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik secara vertikal (sesuai dengan tingkatan kelompok sosial masyarakat) maupun adil secara horizontal (berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat). Implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk

jenis pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak.

c. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Implikasi prinsip kemudahan administrasi terhadap pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan, kemudahan, dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam membayar pajak.

d. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan, jika dimungkinkan melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.

e. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

UU No 28 Tahun 2009 menegaskan bahwa jenis pajak yang diterima kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan atas hak tanah dan bangunan. Sedangkan jenis pajak yang diterima oleh provinsi adalah: pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

## 2. Retribusi Daerah

Merupakan iuran pembayaran masyarakat kepada pemerintah daerah yang sifatnya bisa dipaksa berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebagai pembayaran jasa atas pemberian izin tertentu yang diberikan. Sifat dari retribusi daerah adalah memperoleh kontraprestasi secara langsung.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

### a. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan,

retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

b. Retribusi Jasa Umum

Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuanmayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

### 3. Bagian laba badan usaha milik negara

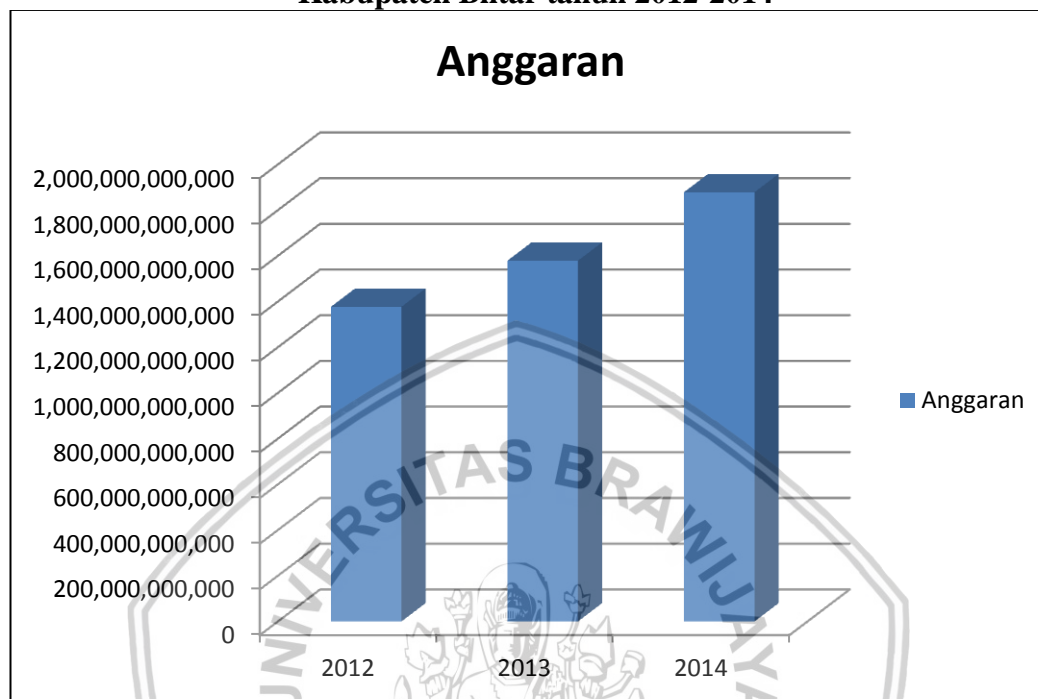
Merupakan bagian pemerintah daerah atas laba BUMD yang dimiliki. Apabila perusahaan daerah (BUMD) mengalami kerugian, maka pemerintah daerah menggunakan dana APBD sebagai subsidi untuk BUMD dan pemerintah daerah tidak mendapatkan bagian laba.

### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No 33 tahun 2004 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Penatausahaan dan pengelolaan keuangan pemerintah dapat mencerminkan kinerja dari pemerintah tersebut yang dapat dilihat dari pelaporan keuangan yang diterbitkan pemerintah disetiap akhir periodenya. Untuk itu maka diperlukan Sistem Pelaporan Keuangan yang kompleks, ada pula informasi menunjukkan potensi keuangan Kabupaten Blitar terkait Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2012-2014 yang ditunjukkan oleh gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Perkembangan Anggaran Pendapatan**  
**Kabupaten Blitar tahun 2012-2014**



*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2012-2014*

Berdasarkan grafik dalam Gambar 2.1 perkembangan anggaran pendapatan Kabupaten Blitar, menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2012 anggaran pendapatan sebesar 1.376.876.230.281 rupiah, tahun 2013 sebesar 1.578.734.008.860 rupiah, dan tahun 2014 sebesar 1.878.258.695.890 rupiah.

## **2.2 Belanja Daerah**

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mardiasmo dalam Wulansari (2015) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran,



yang menjadi beban pemerintah pada suatu periode anggaran dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai undang-undang yang berlaku. Halim dalam Nahlia (2014) menjabarkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, belanja pemerintah daerah menurut kelompoknya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Mahmudi (2010) menerangkan bahwa biaya langsung (direct cost) meliputi :

- a. Biaya Tenaga Kerja Langsung



Yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Belanja tenaga kerja tergolong dalam variable cost (biaya variabel) dimana besaran jumlahnya berfluktuasi mengikuti volume kegiatan, yang termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung adalah honorarium dan upah, lembur, biaya personil lainnya misalnya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

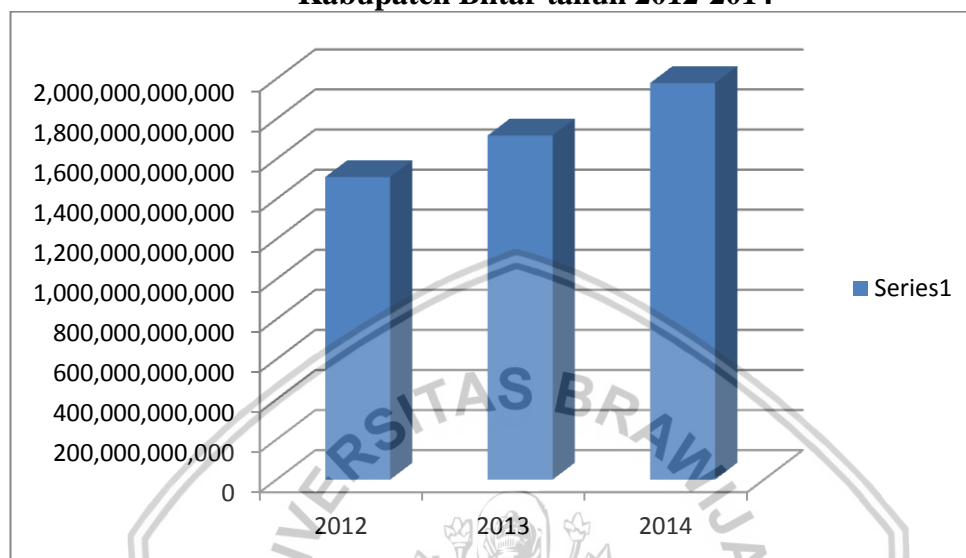
b. Biaya Barang dan Jasa

Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang atau jasa yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Biaya barang dan jasa ini meliputi biaya alat tulis kantor, biaya bahan/material, biaya sewa gedung, kendaraan dan peralatan, biaya perjalanan, biaya cetak dan penggandaan, biaya kontrak hukum (notaris).

3. Belanja Modal

Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software.

**Gambar 2.2.**  
**Perkembangan Anggaran Belanja**  
**Kabupaten Blitar tahun 2012-2014**



*Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2012-2014*

Berdasarkan grafik dalam Gambar 2.2. dari tahun 2012-2014 perkembangan anggaran belanja Kabupaten Blitar, menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2012 anggaran belanja sebesar 1.509.911.616.572,76 rupiah, tahun 2013 sebesar 1.717.403.277.428,18 rupiah, dan tahun 2014 sebesar 1.978.832.457.444,55 rupiah.

## **2.2 Pengelolaan Keuangan Pemda**

### **2.3.1. Perencanaan dan Penganggaran**

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melakukan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal. Rencana-rencana tersebut disusun secara baik yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah

pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Daerah perlu dibuat penyusunan dan dituangkan dalam bentuk anggaran.

Perencanaan dan Anggaran Daerah dapat diinterpretasikan sebagai alat paket pernyataan perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.

Anggaran terjadi dari sebuah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, penerimaan ini digunakan untuk melakukan suatu pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas Pemerintah Daerah yang berguna untuk masa yang akan datang. Sugijanto dkk(1995:22) sebagaimana yang dikutip oleh Halim (2012:15) mengartikan :

“Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut”

Dengan ini, anggaran merupakan suatu pedoman yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu baik itu jangka waktu lama atau jangka waktu pendek, realisasi anggaran merupakan suatu rencana untuk melaksanakan pembangunan perekonomian bagi kepentingan masyarakat. Anggaran Daerah adalah jumlah alat bagi Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas masyarakat. Mardiasmo (2002:182) mengartikan :

“Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan ini bahwa APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan cara memperhatikan potensi dan keaneka ragaman”

Anggaran daerah merupakan salah satu alat pemegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pembangunan dan didalamnya tercermin sebuah kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah tersebut. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan tahunan yang memiliki peranan yang penting dalam mensejahterakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk melakukan suatu rencana operasional Pemerintah Daerah guna membiayai pengeluaran untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Selain itu, Perencanaan dan Penganggaran Daerah diarahkan kepada proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan

juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.

2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

### 2.3.2 Pelaksanaan Anggaran Daerah

Tahap ini dimulai ketika RAPBD telah disahkan dan diperdakan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang dihadapi.

Perda APBD pada hakikatnya merupakan otorisasi parlementer yang akan menjadi dasar bagi eksekutif dalam melaksanakan anggaran. Dalam hal penerimaan maka pemerintah daerah harus berusaha mencapai target penerimaan yang telah disepakati dengan menggali sumber-sumber penerimaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal pengeluaran (belanja) eksekutif hanya berhak menggunakan dana sebatas yang tersedia dalam anggaran.

Monitoring dalam tahap ini sangat penting dilakukan agar kesalahan yang mungkin terjadi dilakukan eksekutif dapat secara dini diatasi. Dalam hal ini masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, memberikan pengawasan terhadap proses-proses tender



yang dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan anggaran akan memperkecil resiko kerugian daerah, dan menciptakan iklim perekonomian yang berbasis pada pengeluaran pemerintah secara sehat dan berdaya guna.

### 2.3.3 Pertanggung jawaban Keuangan Daerah

Tahap akhir dalam siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap pertanggungjawaban ini terkait dengan akuntabilitas. Pada akhir periode tahun anggaran, eksekutif memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Sesuai dengan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban eksekutif meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan terdiri atas realisasi anggaran, neraca daerah dan laporan arus kas yang dilampiri dengan catatan atas laporan keuangan. Laporan kinerja ditujukan untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai eksekutif berdasarkan rencana kinerja yang telah dibuat sebelumnya pada saat pembahasan anggaran.

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawaban penggunaan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dilaksanakan dengan menutup Buku Kas Umum setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban

Sesuai dengan peraturan baru, laporan keuangan sebelumnya diserahkan ke legislatif, diaudit oleh BPK sebagai eksternal auditor. Audit ini dimaksudkan

agar legislatif obyektif dalam memberikan penilaian kebijakan eksekutif. Adanya indikasi inekonomi, inefektif, akan menjadi penilaian bagi legislatif.

## **2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 171 /PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 66, menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap Kementrian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan tahunan berupa LRA, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pasal 71 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan c.q direktorat Jendral Perbendaharaan atas nama Pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semesteran dan tahunan. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi Naggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas laporan Keuangan. LRA dan Neraca merupakan hasil dari konsolidasi laporan keuangan seluruh entitas pelaporan.

### **2.4.1 Neraca**

Menurut Mahmudi dalam Analisis Laporan Keuangan Daerah (2007:62), Neraca pemerintahan daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dalam neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial masa depan diharapkan dapat diperoleh., baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset atau barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

#### **2.4.2 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran APBN atau APBD. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Sedangkan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Secara umum laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Laporan realisasi anggaran disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.

Menurut SAP, dalam penyajian laporan realisasi anggaran terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain adalah Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau oengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil disvestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain, penyertaan modal oleh pemerintah.

#### **2.4.3 Laporan Arus Kas**

Menurut Halim (2012:96) Laporan Arus Kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas dalam satu periode akuntansi dan saldo kas termasuk setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup Laporan Arus Kas terdiri dari

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum Negara/Daerah
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum Negara/Daerah

Dalam akuntansi komersial, yang dimaksud setara kas adalah dana kas yang ditanamkan oleh suatu perusahaan dalam investasi jangka pendek atau investasi yang sangat likuid (mudah dicairkan menjadi kas tanpa resiko), seperti dana kas yang diinvestasikan dalam surat berharga yaitu dalam bentuk obligasi pemerintah dan surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar bursa.

Sedangkan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, kita tidak mengenal adanya pos surat berharga yang diperdagangkan yang dikategorikan dengan setara kas, karena sesuai dengan pasal 19 PP 105 tahun 2000, pemerintah daerah hanya dapat menanamkan dana kasnya dalam sektor investasi yang bebas resiko. Untuk investasi jangka pendek diasumsikan tidak bebas resiko, sehingga apabila hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu likuiditas keuangan daerah, yang pada akhirnya akan mengganggu kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi saldo kas Kas Daerah selama periode tahun anggaran tertentu.

#### **2.4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos-pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,

laporan oprasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
7. Informasi lainya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Secara umum Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

## **2.5 Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian analisis keuangan menurut Halim (2012:L-3) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD perlu dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2012:L-3) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diuraikan berikut ini :



### 2.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Pada rumus diatas dijelaskan bahwa cara mengukur rasio kemandirian keuangan daerah dengan membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Total pendapatan daerah bisa berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio ini menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana external.

Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Paul Harrey dalam Halim (2001:188) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah antara lain :

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

*Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996*

Pada tabel 2.1 diatas dijelaskan bahwa kemampuan daerah dikatakan rendah sekali jika berada pada interval 0-25 berarti kemandirian daerah masih rendah. Bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat masih cukup besar. Pada interval 25-50 tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Disini pemerintah provinsi atau pusat masih berperan memberi bantuan keuangan



kepada pemerintah daerah. Kemandirian daerah dikatakan sedang jika intervalnya pada tingkat 50-75 dan dikatakan tinggi jika intervalnya 75-100. Pada posisi ini pemerintah daerah sudah mampu membiayai kegiatan pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah provinsi atau pusat.

### 2.5.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012:L-6) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dalam Melisa Anastasia (2012:82) tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Pada tabel diatas dijelaskan tentang kriteria efektivitas kinerja keuangan daerah yang di hitung menggunakan satuan prosentase. Jika rasio efektivitas berada pada interval diatas 100% berarti kinerja keuangan pemerintah daerah

sangat efektif. Pada tabel diatas juga juga dapat dilihat jika berada pada interval 90-100 efektivitas kinerja keuangan masih efektif, dan pada interval 80-90 kinerja keuangan bisa dikatakan cukup efektif. Kinerja keuangan bisa dikatakan kurang efektif jika berada pada interval 60-80 dan dibawah 60, kriteria kinerja keuangan dalam hal efektifitas bisa dikatakan tidak efektif.

### 2.5.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima Halim (2012:L-6). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Menurut Halim (2012:L-7) rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3.**

### Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Pada tabel diatas dijelaskan tentang kriteria efisiensi kinerja keuangan daerah yang di hitung menggunakan satuan prosentase. Jika rasio efisiensi berada pada interval diatas 100% berarti kinerja keuangan pemerintah daerah sangat efisien. Pada tabel diatas juga juga dapat dilihat jika berada pada interval 90-100 efisiensi kinerja keuangan masih efisien, dan pada interval 80-90 kinerja keuangan bisa dikatakan cukup efisien. Kinerja keuangan bisa dikatakan kurang efisien jika berada pada interval 60-80 dan dibawah 60, kriteria kinerja keuangan dalam hal efisiensi bisa dikatakan tidak efisien.

#### 2.5.4 Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung secara optimal Halim (2012:L-8). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung daerah berarti persentase belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak langsung daerah maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pada rumus diatas, pengukuran rasio belanja rutin dengan cara total belanja rutin dibagi total belanja daerah. Menurut Halim (2012:107) belanja rutin adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek. Yang termasuk belanja rutin adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Sedangkan perhitungan rasio belanja pembangunan dengan cara total belanja pembangunan dibagi dengan total belanja daerah. Menurut Halim (2012:107) belanja pembangunan adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk belanja pembangunan adalah belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya.

### 2.5.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut Halim (2012:L-10).

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi tahun ke } n - \text{Realisasi tahun ke } n-1}{\text{Realisasi tahun ke } n-1} \times 100\%$$

Dalam menganalisis rasio pertumbuhan pendapatan perlu mempertimbangkan kontribusi komponen pendapatan, sehingga dapat diketahui kontribusi utama pendapatan. Komponen dari pendapatan adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah adalah besarnya pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang baik dan sebaliknya.

Hal lain yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa rasio pertumbuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah rasio pertumbuhan belanja daerah. Dengan analisis rasio pertumbuhan belanja dapat mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dalam pertumbuhannya diharapkan belanja langsung mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.5.6 Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (Debt Service Coverage Ratio).**

Menurut PP 24 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DCSR

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Mahmudi:2007). Ukuran minimal DSCR adalah 2,5%. Rasio DSCR Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Hutang} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Keterangan :

- a. Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.
- b. Biaya lain meliputi biaya administrasi, provisi, komitmen, asuransi, denda.

Berdasarkan rasio ini, pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR nya minimal sebesar 2,5%. Jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal itu mengindikasikan terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutup seluruh beban hutang berupa angsuran pokok dan bunga.

## 2.6. Kerangka Penelitian

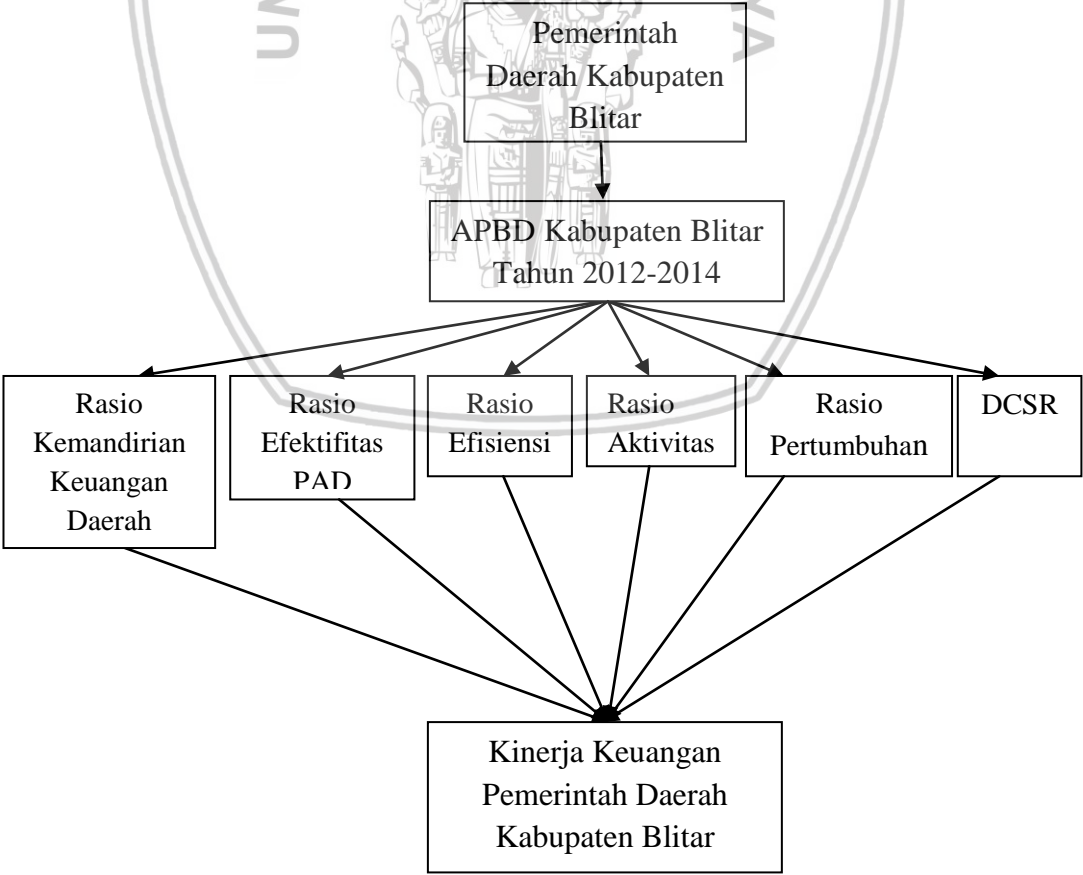
Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan



pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran biaya lebih untuk memperoleh hasil yang lebih. Setiap tahun Kabupaten Blitar melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Dengan demikian, pengaruh besarnya jumlah dana yang dikeluarkan akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar.

**Gambar 2.1. Gambar Kerangka Penelitian**





Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Blitar sebagaimana yang akan dianalisis dalam penelitian ini akan memfokuskan dalam enam analisis rasio utama, antara lain adalah: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (2) Rasio Efektivitas PAD (3) Rasio Efisiensi (4) Rasio Aktivitas (5) Rasio Pertumbuhan (6) Debt Service Coverage Ratio DCSR kemampuan pemerintah membayar kembali hutangnya.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blitar, Kabupaten ini memiliki kegiatan ekonomi dengan menitikberatkan pada sumber daya alam yang melimpah, kaya akan hasil bumi. Selain itu Kabupaten Blitar mempunyai PAD yang terus meningkat dari tahun ketahun. Disisi lain baik dalam kegiatan ekonomi, secara spasial memiliki keunggulan yang berpotensi tinggi.

#### 3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

Penelitian deskriptif menurut Sekaran (2006: 158) adalah penelitian untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam satu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, ataupun orientasi industri kepada peneliti. Supranto (1997:41) mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian deskriptif akan menguraikan karakteristik mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Menurut Uma Sekaran (2006-60), data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini diambil langsung dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Blitar. Data yang diperoleh adalah laporan keuangan pemda Blitar tahun 2012.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diambil bukan melalui sumber utama, termasuk pengkajian literatur-literatur yang terkait, kolektifitas data terkait, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya serta sumber-sumber lain yang relevan sesuai masalah yang terjadi. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada Sekaran (2006-60). Pada penulisan kali ini data yang digunakan adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2013 dan 2014

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan, terlebih dahulu dikumpulkan agar dapat menganalisa dengan cermat dan dapat diambil keputusan, maka diperlukan instrumen Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat data melalui data time

series berdasarkan dokumen atau catatan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Hal ini untuk memperoleh data mengenai:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2012 sampai 2014.
2. Penelitian terdahulu sebagai bahan kajian lanjutan
3. Data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dan diteliti.

### **3.5. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **3.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

#### **3.5.2 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasar Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

### 3.5.3 Rasio Efisiensi

Efisiensi untuk memperoleh ukuran rasio efektivitas daerah yang lebih baik, perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

### 3.5.4 Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut

$$1. \text{ Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$2. \text{ Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD}$$

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

### 3.5.5 Rasio Pertumbuhan

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi tahun ke } n - \text{Realisasi tahun ke } n-1}{\text{Realisasi tahun ke } n-1} \times 100\%$$

### 3.5.6 Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

DCSR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Mahmudi:2007). Ukuran minimal DSCR adalah 2,5. Rasio DSCR Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Hutang} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Keterangan :

1. Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.
2. Biaya lain meliputi biaya administrasi, provisi, komitmen, asuransi, denda

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut Sekaran (2011:158), studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti pada suatu situasi. Analisis data yang dalam penelitian ini lebih memfokuskan dalam data-data sekunder yang berasal dari laporan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2012 sampai dengan 2014. Selanjutnya dari data yang diperoleh dilakukan tahap mengolah data, tahap analisis dan intepretasi data, untuk memperoleh gambaran yang benar dan lengkap terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar.



## BAB IV

### Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Gambaran Umum

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian  $\pm 167$  meter dan luas 1.588,79 km<sup>2</sup>.

Gambar 4.1.



Keadaan Demografi Kabupaten Blitar Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki-laki 630.7754 jiwa. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km<sup>2</sup>.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Pongkok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing-masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Wates.

Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu,

berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.1.1. Visi Misi Kabupaten Blitar**

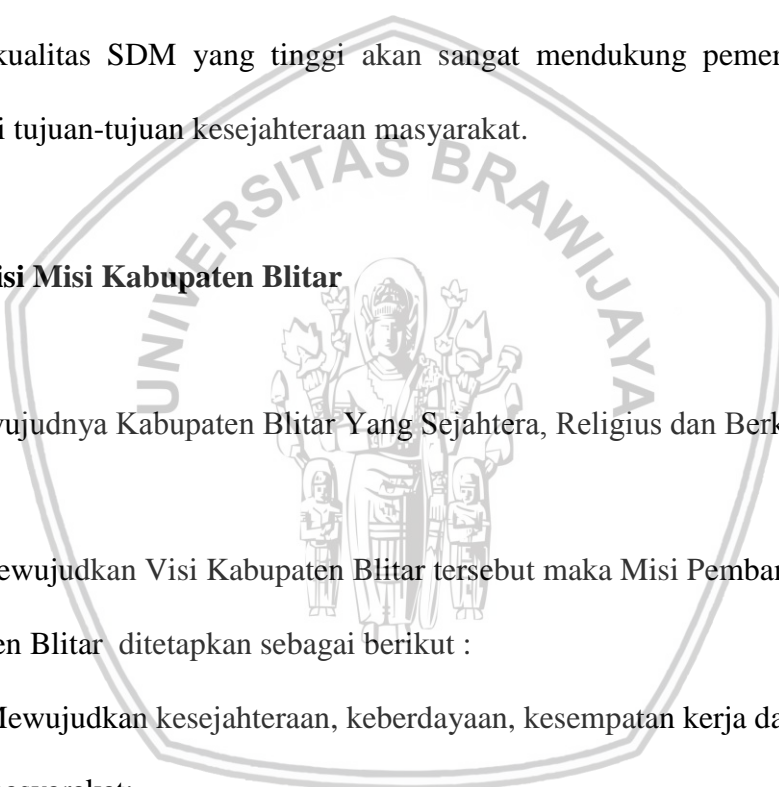
##### Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan”

##### Misi :

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;



4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;
6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan;
7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan tata kelola yang baik.

#### **4.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar**

##### **4.2.1 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)**

Analisis kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Analisis kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang dilakukan terhadap Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012-2014, bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta kemampuan keuangan tentang Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah. Berikut ini rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2012-2014.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.1.**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

*Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996*

Pada tabel 4.1 diatas dijelaskan bahwa kemampuan daerah dikatakan rendah sekali jika berada pada interval 0-25 berarti kemandirian daerah masih rendah. Bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat masih cukup besar. Pada interval 25-50 tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Disini pemerintah provinsi atau pusat masih berperan memberi bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Kemandirian daerah dikatakan sedang jika intervalnya pada tingkat 50-75 dan dikatakan tinggi jika intervalnya 75-100. Pada posisi ini pemerintah daerah sudah mampu membiayai kegiatan pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah provinsi atau pusat.

Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**  
**Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012-2014**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan (Rp)</b>	<b>Kemandirian (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)=(2): (3)
2012	95.782.155.449,42	1.380.532.579.040,42	6,9%
2013	115.670.863.817,37	1.604.229.567.580,37	7,2%
2014	188.827.430.090,89	1.927.712.093.449,89	9,8%
<b>Rata-Rata Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2012-2014</b>			<b>8,0%</b>

*Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Blitar, data diolah (2016)*

Berdasarkan Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2012, 2013, dan 2014 adalah sebesar 6,9%, 7,2% dan 9,8%. Dapat diketahui bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014 berada pada tingkat kemandirian dengan interval 0 - 25 persen. Dengan jumlah tersebut, menurut Kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah yang dituliskan oleh Halim (2001), Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dikatakan sangat rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu berkisar antara 0%-25%. Dalam pola hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah. Ini berarti bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal membiayai kegiatan oprasionalnya termasuk dalam katagori sangat rendah.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun anggaran 2012-2013 sebesar 8,0 % yang termasuk dalam pola hubungan instruktif atau termasuk dalam kategori sangat rendah, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Ketidakmandirian Kabupaten Blitar juga terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD tahun 2010 terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah, dimana pendapatan terbesar dari dana perimbangan. Ini berarti bahwa Kabupaten Blitar belum mampu mengembangkan potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat prtisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam



membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Blitar telah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimiliki dibandingkan pada periode sebelumnya, terbukti dari laporan perhitungan APBD Kabupaten Blitar, total pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan seperti pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi dan mampu menjalankan fungsi otonomi daerah dengan baik.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan lebih meningkatkan lagi pendapatan asli daerah (PAD) agar pemerintah daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat lagi. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Kreativitas pemerintah daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. PAD dapat dipandang



sebagai salah satu indikator untuk mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten kepada pusat yang pada prinsipnya semakin besar PAD dalam APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi.

#### 4.2.2. Analisis Tingkat Efektivitas PAD

Tingkat efektivitas dari PAD dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target atau anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Halim (2012:L-6). Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100$$

**Tabel 4.3.**

#### Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Efektivitas	Kriteria
Diatas 100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Pada tabel diatas dijelaskan tentang kriteria efektivitas kinerja keuangan daerah yang di hitung menggunakan satuan prosentase. Jika rasio efektivitas berada pada interval diatas 100% berarti kinerja keuangan pemerintah daerah sangat efektif. Pada tabel diatas juga juga dapat dilihat jika berada pada interval 90-100 efektivitas kinerja keuangan masih efektif, dan pada interval 80-90 kinerja keuangan bisa dikatakan cukup efektif. Kinerja keuangan bisa dikatakan kurang

efektif jika berada pada interval 60-80 dan dibawah 60, kriteria kinerja keuangan dalam hal efektifitas bisa dikatakan tidak efektif.

Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio efektivitas PAD daerah pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4.**  
**Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012-2014**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Efektivitas (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)=(3): (2)
2012	85.861.460.679,04	95.782.155.449,42	111,55%
2013	101.722.810.475	115.670.863.817,37	113,71%
2014	167.268.618.919	188.827.430.090,89	112,89%
Rata-Rata Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2012-2014			112,72%

*Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Blitar, data diolah (2016)*

Berdasarkan Tabel 4.5. dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 memiliki nilai sangat efektif, secara berturut-turut adalah sebesar 111,55%, 113,71%, dan 112,89%, dimana realisasi total PAD tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 berada di atas anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan tahun 2012 realisasi lain-lain PAD yang sah jauh berada diatas anggaran yang ditetapkan, seperti pendapatan pajak pemerintah daerah kabupaten Blitar berada diatas nilai anggaran yang ditetapkan. Selisih nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak pemda Blitar mencapai 3 miliar rupiah.

Rata-rata rasio efektifitas keuangan daerah pada tahun anggaran 2012-2014 sebesar 112,72% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini

menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Peningkatan rasio efektifitas PAD pada Pemerintah Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dibuktikan dengan meningkatnya prosentase efektifitas yang naik antara 1% setiap tahunnya. Akan tetapi harus lebih ditingkatkan sumber PAD yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena masih dibawah anggaran yang ditetapkan walaupun secara interval sudah efektif. Pemerintah Kabupaten Blitar sudah berusaha dengan baik untuk memaksimalkan PAD yang dimiliki. Bisa dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar sudah baik dalam mengelola potensi daerah Kabupaten Blitar.

Nilai Realisasi PAD yang sah pada tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan yang nilainya mencapai 7 miliar rupiah dan sangat efektif yang awalnya anggaran hanya Rp. 51.382.342.867,- pada realisasinya mencapai Rp. 58.553.895.001,- Akan tetapi, pada tahun anggaran 2012 nilai Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasinya berada dibawah anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan nilai anggaran pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 1.575.563.812,- sedangkan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya Rp. 928.946.344,- Begitu juga dengan Pendapatan Retribusi Daerah realisasinya masih jauh dibawah nilai anggaran yang ditetapkan. Nilai selisih anggaran dan realisasinya mencapai 1 miliar rupiah pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 nilai efektifitas PAD juga sangat efektif karena prosentasenya adalah 113,71%. Nilai selisih anggaran dan realisasi PAD pada tahun 2013 mencapai hampir 14 miliar rupiah. Kenaikan nilai terbesar berada pada Pendapatan Pajak Daerah dengan anggaran Rp. 19.074.528.248,- dan

realisasinya mencapai Rp. 21.856.652.834,- pada tahun 2013. Selain dari Pendapatan Pajak Daerah, efektifitas PAD juga dibantu dengan kenaikan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada tahun 2013 anggaranya hanya Rp. 58.369.129.787,- pada realisasinya mencapai Rp. 71.675.885.863,- lebih tinggi realisasinya daripada nilai anggaran yang ditetapkan.

Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan tercapainya anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun anggaran 2013 nilai Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasinya berada dibawah anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan nilai anggaran pada tahun 2013 yang mencapai Rp. 2.694.048.967,- sedangkan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya Rp. 1.573.086.737,- Begitu juga dengan Pendapatan Retribusi Daerah realisasinya masih jauh dibawah nilai anggaran yang ditetapkan. Nilai selisih anggaran dan realisasinya mencapai 1 miliar rupiah pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 nilainya juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada beberapa sumber PAD yang masih belum mencapai anggaran yang ditetapkan. Sumber PAD yang masih berada dibawah nilai anggaran adalah Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah nilainya sudah diatas anggaran yang ditetapkan. Akan tetapi Rasio efektifitas PAD pada tahun 2014 sudah sangat efektif karena prosentasenya sebesar 112,89%.

Dapat disimpulkan bahwa kenaikan PAD Pemerintah Kabupaten Blitar bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah telah dikelola dengan baik. Sesuai dengan rasio interval pedoman penilaian dan kinerja keuangan, maka tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 sangat efektif, karena berada pada interval diatas 100 persen.

#### 4.2.3. Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (Belanja Daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima Halim (2012:L-6). Analisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan atau proyek dengan melakukan perbandingan antara output/pengeluaran dengan input/masukan. Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

**Tabel 4.5.**  
**Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Persentase Efisiensi	Kriteria
100 keatas	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Pada tabel diatas dijelaskan tentang kriteria efisiensi kinerja keuangan daerah yang di hitung menggunakan satuan prosentase. Jika rasio efisiensi berada pada interval diatas 100% berarti kinerja keuangan pemerintah daerah sangat efisien. Pada tabel diatas juga juga dapat dilihat jika berada pada interval 90-100 efisiensi kinerja keuangan masih efisien, dan pada interval 80-90 kinerja keuangan bisa dikatakan cukup efisien. Kinerja keuangan bisa dikatakan kurang efisien jika berada pada interval 60-80 dan dibawah 60, kriteria kinerja keuangan dalam hal efisiensi bisa dikatakan tidak efisien.

Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6.**  
**Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012-2014**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Total Realisasi Belanja Daerah (Rp)</b>	<b>Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Efisiensi (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)=(2): (3)
2012	1.372.246.729.995,47	1.380.532.579.040,42	99,40
2013	1.637.252.053.174,00	1.604.229.567.580,37	102,06
2014	1.803.200.913.471,44	1.927.712.093.449,89	93,54
Rata-Rata Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2012-2014.			98,33

*Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Blitar, data diolah (2016)*

Dari Tabel 4.6. dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2012 adalah sebesar 99,40%, 2013 adalah sebesar 102,06%, dan pada tahun 2014 adalah sebesar 93,54% atau sesuai dengan Tabel 4.7 tahun 2012 dan 2014 tergolong kriteria



kurang efisien, karena berada pada interval 90 - 100 persen. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang sedikit lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Tahun 2013 tergolong kriteria tidak efisien, karena berada pada interval lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang lebih sedikit daripada realisasi belanja daerah.

Pada tahun 2012 efisiensi Belanja terhadap Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Blitar masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan total belanja pada tahun 2012 jumlahnya hanya sedikit lebih besar dibanding total pendapatan. Total Realisasi Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.380.532.579,040,42 sedangkan total Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.372.246.729.995,47. Hasil tersebut masih dirasa kurang jika dilihat dari kriteria efisiensi kinerja keuangan yang nilai intervalnya sebesar 60%-80%. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Blitar diketahui bahwa rasio efisiensi belanja adalah sebesar 99,40% dan masih dikelompokkan dengan kriteria tidak efisien.

Berbeda dengan tingkat efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013 yang sudah dikategorikan tidak efisien lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan total belanja pada tahun 2013 berada jauh diatas total pendapatan. Total Realisasi Belanja pada Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.637.252.053.174,00 sedangkan total Realisasi Pendapatan hanya sebesar Rp. 1.604.229.567.580,37. Jika dinilai dari tingkat efisiensi belanja terhadap pendapatan hasilnya tidak efisien karena rasio efisiensi belanja pada tahun 2013 adalah sebesar 102,06% sedang tingkat efisiensinya berada pada angka 60%-80%.

Rasio pada tahun 2014 hasilnya hampir sama dengan tahun 2012 dimana tingkat efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah masih kurang efisien.



Total Realisasi Belanja pada Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.803.200.913.471,44 sedangkan total Realisasi Pendapatan hanya sebesar Rp. 1.927.712.093.449,89. Hasil tersebut masih dirasa kurang jika dilihat dari kriteria efisiensi kinerja keuangan yang nilai intervalnya sebesar 60%-80%. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar diketahui bahwa rasio efisiensi belanja adalah sebesar 93,54% dan masih dikelompokkan dengan kriteria tidak efisien.

Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun anggaran 2012-2014 sebesar 98,33 % yang termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar terkesan kurang menyerap anggaran dengan baik. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Juga, terdapat kemungkinan Kabupaten Blitar memiliki kecenderungan selalu ingin menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

Mardiasmo (2002:159) menyatakan bahwa selama ini pemerintah daerah menggunakan aturan bahwa jumlah belanja daerah yang tertera pada APBD adalah jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos belanja daerah, sehingga ada kecenderungan untuk menghabiskan semua dana belanja daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan analisis efisiensi keuangan, Kabupaten Blitar tidak berhasil untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah.

#### 4.2.4 Analisis Rasio Kесerasian Belanja Daerah

Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal Halim (2012:L-8). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak langsung maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio Kесerasian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Total Belanja Rutin/Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan/Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7.

**Rasio Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2012-2014**

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2014	2013	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Total Belanja Rutin/Operasi	1.363.044.753.326,44	1.300.295.938.835,00	1.146.096.246.339,47
2	Total Belanja Pembangunan	385.260.453.752,00	330.813.083.801,00	224.420.815.644,00
3	Total Belanja Daerah	1.803.200.913.471,44	1.637.252.053.174,00	1.372.246.729.995,47
		%	%	%
4	Rasio Belanja Aparatur	75,59	79,42	83,52
5	Rasio Belanja Publik	21,37	20,21	16,35
	<b>Rata-rata Belanja Rutin</b>	79,51%		
	<b>Rata-rata Belanja Pembangunan</b>	19,31%		

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Blitar, data diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa rasio belanja Aparatur Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2012 sebesar 83,52%, tahun anggaran 2013 sebesar 79,42%, dan tahun anggaran 2014 sebesar 75,59% sehingga rata-rata total belanja rutin terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2012 – 2014 sebesar 79,51%. Total belanja pembangunan terhadap total belanja daerah pada tahun anggaran 2012 sebesar 16,35%, tahun anggaran 2013 sebesar 20,21%, dan tahun anggaran 2014 sebesar 21,37% sehingga rata-rata total belanja langsung terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2012-2014 sebesar 19,31%.

Analisis rasio keserasian belanja daerah kabupaten blitar pada tahun 2012-2014 dibagi menjadi 2 yaitu rasio belanja aparatur dan rasio belanja publik. Pada rasio belanja aparatur yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,

belanja modal gedung dan bangunan prosentase dari tahun 2012-2014 cenderung menurun. Akan tetapi jika dilihat dari prosentase yang rata-rata mencapai 70% sudah cukup baik dalam penyerapan anggaran. Walaupun semakin menurun prosentase penyerapan anggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 namun secara rupiah nilai anggaran dan realisasinya semakin naik dari tahun ketahun. Bisa dilihat dalam tabel 4.7 nilai dari realisasi belanja rutin nilainya semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Blitar sudah cukup baik dalam menyerap anggaran yang ditetapkan.

Berbeda dengan rasio belanja publik, prosentase belanja aparatur yang terdiri dari yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga dari tahun 2012-2014 malah cenderung meningkat. Akan tetapi prosentase setiap tahunnya rata-rata penyerapan anggaran hanya 20% dari total anggaran yang ditetapkan. Walaupun prosentase penyerapan anggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terbilang rendah, namun secara rupiah nilai anggaran dan realisasinya semakin naik dari tahun ketahun. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari penyerapan anggaran masih kurang baik, tetapi jika dilihat dari jumlah anggaran belanja rutin, belanja pembangunan dan realisasinya semakin tahun justru semakin naik.

Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Halim (2012:L-8). Selama tahun anggaran 2012 - 2014 memperlihatkan rata-rata alokasi belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan. Belanja rutin digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai

program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Belanja Rutin diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pembangunan, karena belanja rutin lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Pendapat tersebut juga diperkuat pendapat Mega (2012:47) alokasi belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan untuk membiayai program pemerintah.

#### **4.2.5. Analisis Rasio Pertumbuhan**

Analisis rasio pertumbuhan bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode Halim (2012:L-12). Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Analisis rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan APBD, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluarannya atau belanja daerah.

Titik berat analisis pertumbuhan terhadap pendapatan daerah dalam penelitian ini adalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh atas PAD yaitu, ketentuan yang berupa peraturan daerah (dengan berpedoman pada UU dan PP), penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta sistem pemungutannya, dan penilaian kinerja terhadap Dinas

Pengelolaan Kas dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Blitar.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi Pemerintah Kabupaten Blitar, sehingga dapat meningkatkan PAD. Rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi tahun ke } n - \text{Realisasi tahun ke } n-1}{\text{Realisasi tahun ke } n-1} \times 100\%$$

Untuk dapat melihat pertumbuhan PAD pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel 4.8.

**Tabel 4.8.**

**Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012-2014**

No	Sumber PAD	Tahun Anggaran			
		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	Rata-rata (%)
1	Pajak Daerah	8	16	119	48
2	Retribusi Daerah	30	18	17	21
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan	-26	69	28	24
4	Lain-Lain PAD	33	22	60	39
	Rata-rata pertumbuhan PAD	11	31	56	33

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Blitar, data diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 4.8. maka rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Blitar untuk tahun 2012-2014 terhadap tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan PAD terbesar terjadi pada



pajak daerah sebesar 119% pada tahun 2014, sedangkan pertumbuhan PAD terkecil terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan sebesar negatif 26% pada tahun 2012.

Sumber PAD pada retribusi daerah setiap tahunnya justru mengalami penurunan prosentase yang cukup besar. Akan tetapi dari segi nilai anggaran dan realisasinya semakin tahun semakin meningkat. Hal tersebut juga dibuktikan dengan rata-rata pertumbuhan sumber PAD yang berasal dari Retribusi Daerah tumbuh sebesar 21%. Menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun semakin meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah dan memaksimalkan potensi yang ada.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pertumbuhannya bisa dikatakan masih kurang. Dapat dilihat pada tahun 2012 pertumbuhannya dibawah 0% yaitu negatif 26%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 928.946.344,78. Padahal, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2011 mencapai Rp. 1.249.337.841,04. Tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 69%. Sangat disayangkan pada tahun 2014 prosentasenya menurun menjadi 28% namun jika dilihat realisasinya jumlahnya sangat besar yaitu Rp. 2.012.683.600,95. Rata-rata pertumbuhan PAD yang bersumber dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 24% dan masih bisa dikatakan pertumbuhan yang positif.

Yang terakhir adalah sumber PAD yang berasal dari Lain-lain PAD pada tahun 2012 sebesar 33% dan jumlahnya menurun pada tahun 2013 sebesar 22%. Walaupun nilai persentasenya menurun tetapi nilai realisasinya meningkat yaitu dari Rp. 58.553.895.001,18 pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 71.675.885.863,85 pada tahun 2013. Berbeda dengan tahun 2014 yang nilainya naik sebesar 60% dengan total realisasi sebesar RP. 114.914.856.855,34. Rata-rata Rasio PAD bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar 39% yang dapat dikatakan pertumbuhan yang baik.

Pada tahun 2013 rata-rata pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 31%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pajak daerah sebesar 16%, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan sebesar 69% dan lain-lain PAD sebesar 22%.

Rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Blitar selama tahun 2012-2014 sebesar 33% dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini memberikan gambaran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan PAD. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 48%, retribusi daerah sebesar 21% karena, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yg dipisahkan sebesar 24% dan lain-lain PAD sebesar 39%.

#### **4.2.5. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).**

Menurut PP 24 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan

angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DCSR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Mahmudi:2007). Ukuran minimal DCSR adalah 2,5. Rasio DCSR Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Hutang} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Keterangan :

- a. Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.
- b. Biaya lain meliputi biaya administrasi, provisi, komitmen, asuransi, denda.

**Tabel 4.9.**  
**Perhitungan Rasio DCSR Pemerintah Kabupaten Blitar**  
**Tahun Anggaran 2012-2014**

Keterangan	2012	2013	2014
PAD	95.782.155.449,42	115.670.863.817,37	188.827.430.090,89
Dana Bagi Hasil Pajak	47.044.047.268,00	45.036.592.116,00	27.764.546.810,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	29.008.885.450,00	28.581.290.956,00	34.676.514.522,00
DAU	845.117.933.000,00	944.297.542.000,00	1.027.251.687.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.016.953.021.167,42</b>	<b>1.133.586.288.889,37</b>	<b>1.278.520.178.422,89</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>874.620.409.290,78</b>	<b>959.366.258.673,00</b>	<b>1.016.728.197.141,00</b>
Angsuran Pokok Hutang	975.961.688,00	0,00	0,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	9.721.202,44
<b>Jumlah</b>	<b>975.961.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721.202,44</b>
Rasio DCSR	145%	0	27%

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Blitar, data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2012

dan 2014 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR nya di atas 2,5%. Di tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar cukup besar dengan nominal sebesar Rp. 95.782.155.449,42. Hal tersebut juga didukung dengan besarnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 47.044.047.268,00 , Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 29.008.885.450,00 dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 845.117.933.000,00.

Pada tahun 2012 Belanja Wajib hanya terdiri dari Belanja Pegawai yang nilainya sebesar RP. 874.620.409.290,78. Pada tahun tersebut juga terdapat Angsuran Pokok Hutang yang nilainya sebesar Rp. 975.961.688,00 yang digunakan untuk pembayaran utang kepada CV. Pahala Abadi atas biaya cetak KTP dan KK tahun 2011 Rp. 645.865.500,00 dan pembayaran Kewajiban Pemda pada Pihak Ketiga berupa sisa pekerjaan tahun 2010 yang terkena bencana alam banjir Rp. 330.096.188,00. Pada rasio DSCR tahun 2012 tergolong sangat baik karena prosentasenya mencapai 145%.

Di tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar cukup besar dengan nominal sebesar Rp. 115.670.863.817,37. Hal tersebut juga didukung dengan besarnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 47.044.047.268,00, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 28.581.290.956,00 dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 944.297.542.000,00. Belanja Wajib pada tahun 2013 hanya terdiri dari Belanja Pegawai yang nilainya sebesar Rp. 959.366.258.673,00. Pada tahun ini tidak terdapat Angsuran Pokok Hutang dan Belanja Bunga. Oleh sebab itu

Rasio DSCR tidak dapat dihitung, tetapi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan keuangan daerah sudah baik.

Di tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar cukup besar dengan nominal sebesar Rp. 188.827.430.090,89. Hal tersebut juga didukung dengan besarnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 27.764.546.810,00, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp34.676.514.522,00 dan Dana Alokasi Umum yang nilainya sangat besar Rp. 1.027.251.687.000,00. Pada tahun 2014 Belanja Wajib hanya terdiri dari Belanja Bunga yang nilainya sebesar RP. 9.721.202,44. Rasio DSCR pada tahun ini terbilang baik karena nilainya lebih dari 2,5%. Nilai rasio DSCR pada tahun 2014 adalah sebesar 27% yang bisa dibilang sangat baik.

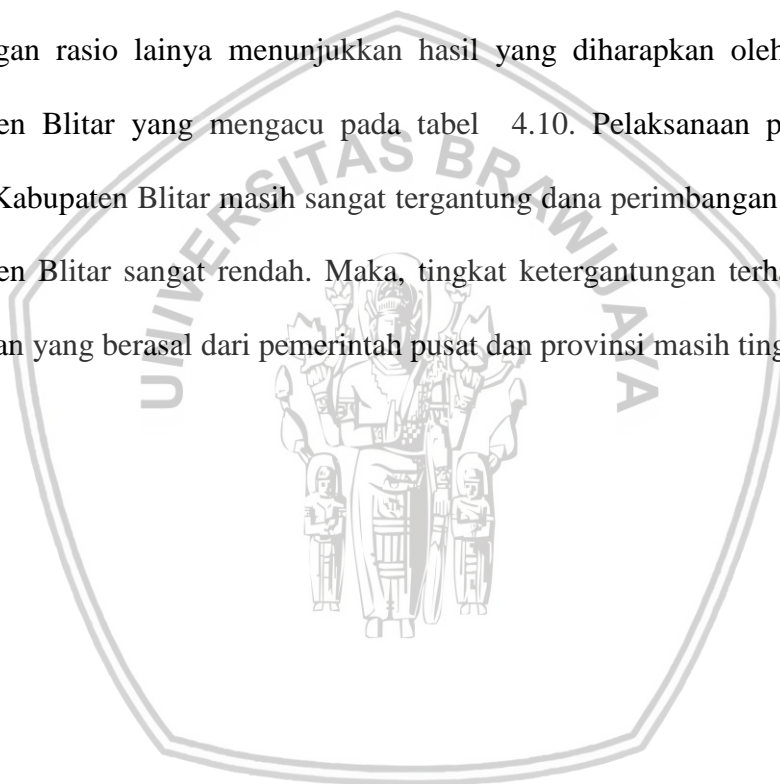
#### 4.3. Hasil Analisis Perhitungan Rasio Keuangan

**Tabel 4.10**  
**Hasil Analisis Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 sampai 2014**

No	Analisis Rasio	Hasil
1	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah	Pola instruktif
2	Analisis Efektifitas PAD	Kategori efektif
3	Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah	Kurang efisien
4	Analisis Keserasian Belanja Daerah 1. Rasio Belanja Rutin 2. Rasio Belanja Pembangunan	Dana yang dimiliki masih dialokasikan kepada belanja rutin. Sehingga rasio belanja pembangunan relatif kecil
5	Rasio Pertumbuhan	Menunjukkan pertumbuhan yang positif
6	DSCR ( <i>Debt Service Coverage Ratio</i> )	Sangat baik

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2012 sampai 2014 Kabupaten Blitar terdapat enam rasio diantaranya menunjukkan kinerja keuangan yang dengan beberapa hasil masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan rasio analisis kemandirian keuangan daerah dengan pola instruktif dengan pemahaman daerah tersebut masih bergantung kepada pemerintah pusat berikutnya, hasil perhitungan analisis tingkat efisiensi keuangan daerah memiliki kategori kurang efisien. Namun perhitungan rasio lainnya menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar yang mengacu pada tabel 4.10. Pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Blitar masih sangat tergantung dana perimbangan karena PAD Kabupaten Blitar sangat rendah. Maka, tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar masih belum optimal. Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar masih sangat tergantung dana perimbangan karena PAD Kabupaten Blitar sangat rendah. Maka, tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi.
2. Pada hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diketahui bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014 berada pada tingkat kemandirian dengan pola hubungan Instruktif.
3. Hasil analisis tingkat efektifitas PAD dapat disimpulkan bahwa kenaikan PAD Pemerintah Kabupaten Blitar dikategorikan efektif.
4. Rata-rata rasio efisiensi keuangan dalam kategori tidak efisien. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar terkesan kurang menyerap anggaran dengan baik.

5. Analisis rasio keserasian belanja selama tahun anggaran 2012 - 2014 memperlihatkan rata-rata alokasi belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan.
6. Hasil dari analisis pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Blitar selama tahun 2012-2014 sebesar 33% dan menunjukkan pertumbuhan yang positif.
7. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2012 dan 2014 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR nya di atas 2,5%.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Belum adanya tolok ukur yang pasti pada beberapa rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan. Sehingga penulis mengalami kendala untuk menilai dan menginterpretasikan hasil analisis dari beberapa rasio keuangan tersebut. Selain hal tersebut keterbatasan waktu penelitian juga menjadi kendala

## **5.3. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah wawasan tentang analisis rasio keuangan mengingat beberapa rasio keuangan belum ada tolok ukur yang pasti. Selain itu lebih baik lagi jika menganalisis secara keseluruhan unsur-unsur perkembangan APBD sehingga hasil yang didapat akan lebih lengkap dan menyeluruh.

2. Menambah model rasio, objek penelitian dan tahun anggaran sangat disarankan agar mendapat hasil penelitian yang lengkap. Dan bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan model penganalisaan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada analisis rasio keuangan saja.

